

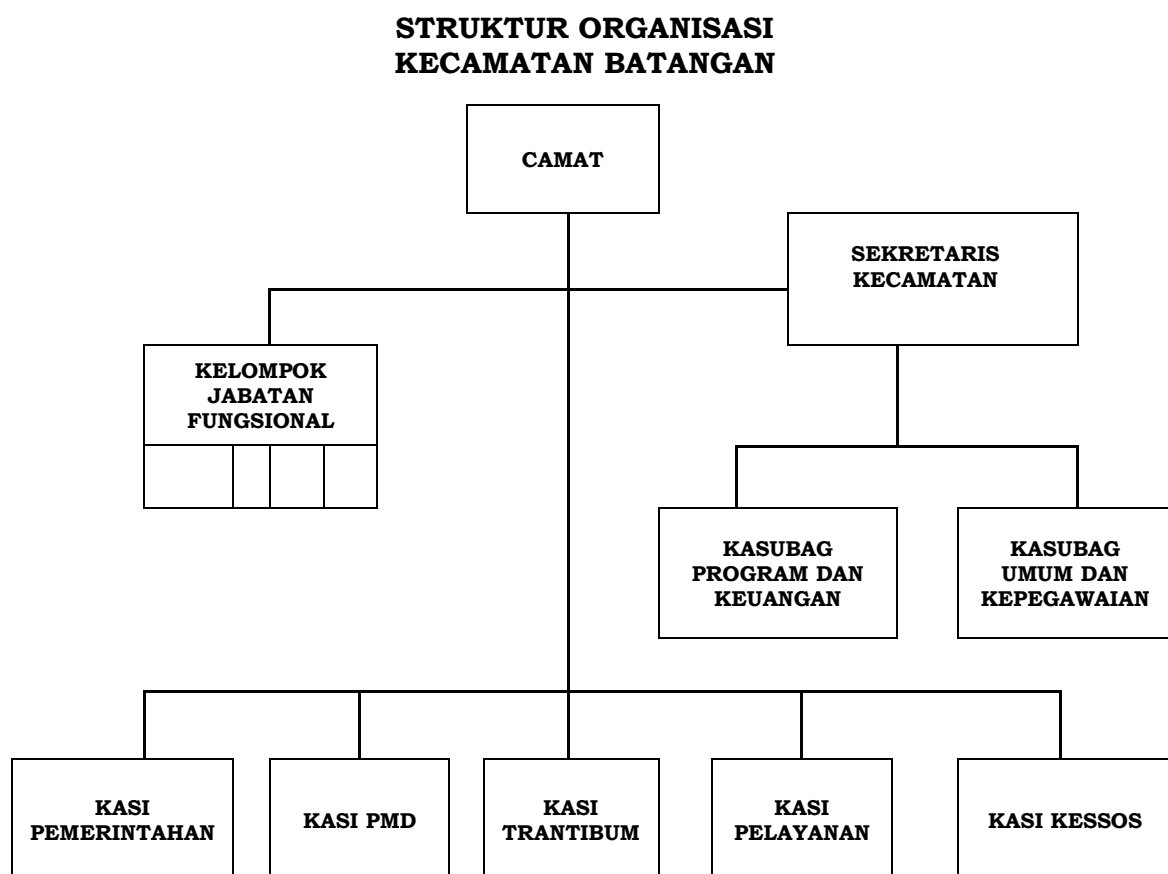
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Batangan

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, susunan organisasi Kecamatan Batangan terdiri atas:



2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi

		<p>kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek Pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan. - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerja Kecamatan.

	<ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup. - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	---

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.

3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.
---	---	--

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Batangan berjumlah 18 orang, terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
	Kec. Batangan								
1	Camat	1						1	
2	Sekcam	1						1	
3	Kasubag Program dan Keuangan				1			1	
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian				1			1	
5	Kasi Pemerintahan				1			1	
6	Kasi PMD				1			1	
7	Kasi Trantibum			1				1	
8	Kasi Pelayanan Umum				1			1	
9	Kasi Kessos				1			1	
10	Staf Seksi Pemerintahan					1		1	
11	Staf Seksi Trantibum					1		1	
12	Staf Seksi Yanum					1		1	
13	Staf Seksi PMD						1	1	
14	Non PNS					2	3	5	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, Januari 2017

Tabel II.4
Kondisi Kepegawaian di Kec.Batangan Berdasarkan Pendidikan yang
Ditamatkan

No	Uraian	<SLTP		SLTA		Diplo ma		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat									1		1	
2	Sekcam							1				1	
3	Kasubag Program dan Keuangan								1				
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian								1			1	
5	Kasi Tata Pemerintahan								1			1	
6	Kasi PMD								1			1	
7	Kasi Trantibum							1				1	
8	Kasi Pelayanan Umum								1			1	
9	Kasi Kessos								1			1	
10	Staf Seksi Pemerintahan					1						1	
11	Staf Seksi Trantibum					1						1	
12	Staf Seksi Yanum					1						1	
13	Staf Seksi PMD				1							1	
14	Non PNS	1	1	1	1				1			5	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, Januari 2017

Tabel II.5
Kondisi Kepegawaian di Kec.Batangan
Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol I		Gol II		Gol III		Gol IV		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Camat							1		1	
2	Sekcam							1		1	
3	Kasubag Program dan Keuangan						1				1
4.	Kasubag						1				1

	Umum dan Kepegawaian									
5	Kasi Tata Pemerintahan					1				1
6	Kasi PMD					1				1
7	Kasi Trantibum				1				1	
8	Kasi Pelayanan Umum					1				1
9	Kasi Kessos					1				1
10	Staf Seksi Pemerintahan				1				1	
11	Staf Seksi Trantibum				1				1	
12	Staf Seksi Yanum		1						1	
13	Staf Seksi PMD			1						1
14	Non PNS								2	3

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, Januari 2017

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.6
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	4	Unit	Baik	Kantor,Aula, Rumah Dinas, Gudang
2	Ruangan Kantor	6	Ruang	5 Baik 1 kurang baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	
4	Kendaraan roda 2	6	Unit	3 Baik 3 Kurang Baik	
5	Peralatan Kerja				
	- Komputer	4	Unit	3 baik 1 kurang baik	
	- Laptop	5	Unit	3 baik 2 kurang	

				baik	
	- Printer	6	Unit	3 baik 2 kurang baik 1 rusak	
	- Meja	24	Unit	21 baik 3 kurang baik	
	- Kursi	28	Unit	24 baik 4 kurang baik	
	- Almari	4	Unit	3 baik 1 kurang baik	
	- Filling Kabinet	8	Unit	5 baik 3 kurang baik	
	-AC	3	Unit	baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Batangan, Januari 2017

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia baru sebanyak 6 unit terdiri dari 1 unit mobil dan 5 unit sepeda motor (2 unit baik, 3 unit kurang baik) maka kedepan pemerintah Kecamatan Batangan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 7 unit sepeda motor terdiri dari 4 unit untuk pejabat yang belum mendapatkan kendaraan operasional dan 3 unit untuk penggantian kendaraan operasional yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 5 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 2 kondisi kurang baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih membutuhkan penambahan laptop sebanyak 8 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 6 unit dengan 3 dalam kondisi baik, 2 kondisi kurang baik dan 1 kondisi rusak, maka ke depan masih membutuhkan penambahan

printer sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 24 unit dengan 21 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 28 unit dengan 24 dalam kondisi baik dan 4 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 1 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 7 unit lagi untuk 7 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 4 unit dengan 3 dalam kondisi baik dan 1 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 5 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan Batangan saat ini sebanyak 8 unit dengan 5 dalam kondisi baik dan 3 kondisi kurang baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 5 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

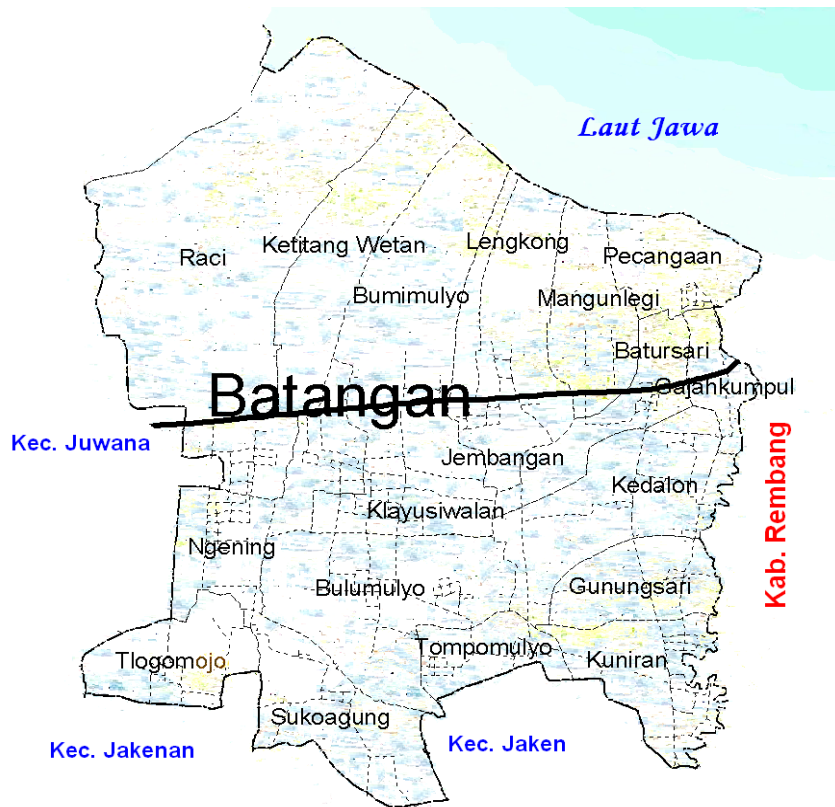
2.2.3. Kondisi umum Kecamatan Batangan

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan Batangan merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 5.066 Ha. Secara administratif Kecamatan Batangan dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Laut Jawa
- Bagian Timur : Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang
- Bagian Barat : Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

PETA KECAMATAN BATANGAN



Kawasan perencanaan yang menjadi lingkup kerja Kecamatan Batangan dapat dilihat dalam tabel II.7 berikut ini :

Tabel II.7
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Batangan

No	Desa	Luas Wilayah	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1.	Tlogomojo	167,23	3	14	a. Pengembangan outlet komoditi hasil laut, perikanan, dan buah-buahan b. Pengembangan pelabuhan khusus sebagai pendukung pengembangan kegiatan industri di Kecamatan Batangan c. Rencana pengembangan prasarana jalan nasional bebas hambatan yang menghubungkan Kota Semarang-Kabupaten Rembang yang melewati
2.	Sukoagung	204,60	2	7	
3.	Bulumulyo	342,91	5	30	
4.	Tompomulyo	236,56	3	18	
5.	Kuniran	256,92	6	25	
6.	Gunungsari	198,42	2	15	
7.	Kedalon	369,59	4	20	
8.	Klayusiwalan	280,98	2	18	
9.	Ngening	163,25	2	11	
10.	Raci	852,80	5	25	

11.	Krtitangwetan	390,20	2	10	Kabupaten Pati d. Pemantapan dan pengembangan jalan arteri primer menjadi 4 (empat) lajur, meliputi sepanjang jalan pantai utara yang menghubungkan Daerah dengan kota-kota besar PKW dan PKN
12.	Bumimulyo	471,45	3	15	
13.	Jembangan	212,65	2	15	
14.	Lengkong	292,85	3	15	
15.	Mangunlsgi	313,26	2	7	
16.	Batursari	173,21	3	14	
17.	Gajahkumpul	82,48	2	8	
18.	Pecangaan	56,64	2	7	

Sumber: Seksi Pemerintahan Kecamatan Batangan, 2016

2.2.3.2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Batangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 42.878 jiwa, yang terdiri dari 21.072 jiwa laki-laki dan 21.806 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Batangan tahun 2016 berjumlah 14.085 KK. Berdasarkan data Kecamatan Batangan Dalam Angka tahun 2016 kepadatan penduduk sebesar 536 jiwa per km². Profil kependudukan Kecamatan Batangan digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel II.8

Jumlah Penduduk menurut Struktur Umur di Kecamatan Batangan

No	Kelompok Umur	L	%	P	%	jumlah	%
1	0-4	1.580	51,03	1.516	48,97	3.096	100
2	5-9	1.624	52,83	1.450	47,17	3.074	100
3	10-14	1.505	52,35	1.370	47,65	2.875	100
4	15-19	1.529	51,73	1.427	48,27	2.956	100
5	20-24	1.496	48,63	1.580	51,37	3.076	100
6	25-29	1.442	47,05	1.623	52,95	3.065	100
7	30-34	1.455	47,03	1.639	52,97	3.094	100
8	35-39	1.681	48,25	1.803	51,75	3.484	100
9	40-44	1.570	49,31	1.614	50,69	3.184	100
10	45-49	1.606	48,86	1.681	51,14	3.287	100
11	50-54	1.533	49,18	1.584	50,82	3.117	100
12	55-59	1.286	50,37	1.267	49,63	2.553	100
13	60-64	1.139	54,21	962	45,79	2.101	100

14	65-69	639	48,19	687	51,81	1.326	100
15	70-74	459	45,00	561	55,00	1.020	100
16	75+	528	33,63	1.042	66,37	1.570	100

Sumber: Kecamatan Batangan dalam angka 2017

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan di Kecamatan Batangan sebagai berikut :

Tabel II.9

Jumlah Penduduk menurut Pendidikan di Kecamatan Batangan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah	%
1	Tidak/Belum sekolah	4.162	4.288	8.450	19,38%
2	Belum tamat SD/MI	2.703	2.720	5.423	12,44%
3	Tamat SD/MI	7.610	7.337	14.947	34,29%
4	SLTP/Sederajat	4.314	4.346	8.660	19,87%
5	SLTA/Sederajat	2.498	2.422	4.920	11,29%
6	DI/DII	44	82	26	0,29%
7	Akademi/DIII/Sarmud	101	153	254	0,58%
8	Diploma IV/S1	380	406	786	1,80%
9	S2	18	8	26	0,06%
10	S3	0	2	2	0,00%
	JUMLAH			43.594	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kab.Pati, 2016

Profil penduduk menurut jenis pekerjaan di Kecamatan Batangan sebagai berikut :

Tabel II.10

Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan Batangan

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	4.487	4.136	8.623	19,78%
2	Mengurus rumah tangga	8	7.732	7.740	17,75%
3	Pelajar/mahasiswa	3.224	2.725	5.949	13,65%
4	Pensiunan	56	17	73	0.17%
5	PNS	133	106	239	0,55%
6	TNI	28	0	28	0,06%
7	Polri	40	0	40	0,09%
8	Pedagang	146	358	504	1,16%

9	Petani/pekebun	4.438	2.621	7.459	17,11%
10	Peternak	3	4	7	0,02%
11	Nelayan/Perikanan	1.529	4	1.533	0,26%
12	Industri	51	62	113	0,026%
13	Konstruksi	13	0	13	0,03%
14	Transportasi	29	0	29	0,07%
15	Karyawan swasta	1.407	1.115	2.522	5,79%
16	Karyawan BUMN	14	6	20	0,05%
17	Karyawan BUMD	9	0	9	0,02%
18	Karyawan Honorer	23	30	53	0,12%
19	Buruh harian lepas	295	238	533	1,22%
20	Buruh tani/Perkebunan	473	423	894	2,05%
21	Buruh Nelayan/Perikanan	165	14	179	0,41%
22	Buruh Peternakan	3	0	3	0,01%
23	Pembantu Rumah Tangga	0	35	35	0,08%
24	Tukang Cukur	2	0	2	0,00%
25.	Tukang Listrik	2	0	2	0,00%
26.	Tukang Batu	206	0	206	0,47%
27	Tukang Kayu	187	0	187	0,43%
28	Tukang Sol Sepatu	1	0	1	0,00%
29	Tukang Las/Pandai Besi	15	0	15	0,03%
30	Tukang Gigi	1	0	1	0,00%
31	Penata Rias	0	4	4	0,00%
32	Penata Busana	0	0	0	0,00%
33	Penata Rambut	0	0	0	0,00%
32	Penata Busana	21	0	21	0,05%
33	Seniman	17	3	20	0,05%
34	Tabib	0	0	0	0,00%
35	Paraji	0	2	2	0,00%
36	Perancang Busana	0	0	0	0,00%
37	Penterjemah	0	0	0	0,00%
38	Imam Masjid	0	0	0	0,00%
39	Pendeta	5	1	6	0,01%
40	Pastor	0	0	0	0,00%
41	Wartawan	1	0	1	0,00%

42	Ustadz/Mubaligh	6	1	7	0,02%
43	Juru Masak	5	0	5	0,01%
44	Promotor Acara	0	0	0	0,00%
45	Anggota DPR RI	0	0	0	0,00%
46	Anggota DPD	0	0	0	0,00%
47	Anggota BPK	0	0	0	0,00%
48	Presiden	0	0	0	0,00%
49	Wakil Presiden	0	0	0	0,00%
50	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0,00%
51	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0	0	0,00%
52	Duta Besar	0	0	0	0,00%
53	Gubernur	0	0	0	0,00%
54	Wakil Gubernur	0	0	0	0,00%
55	Bupati	1	0	1	0,00
56	Wakil Bupati	0	0	0	0,00%
57	Walikota	0	0	0	0,00%
58	Wakil Walikota	0	0	0	0,00%
59	Anggota DPRD Prop.	0	0	0	0,00%
60	Anggota DPRD Kab.	0	0	0	0,00%
61	Dosen	5	5	10	0,02
62	Guru	92	222	314	0,68%
63	Pilot	0	0	0	0,00%
64	Pengacara	0	0	0	0,00%
65	Notaris	0	1	1	0,00%
66	Arsitek	1	0	1	0,00%
67	Akuntan	0	0	0	0,00%
68	Konsultan	0	0	0	0,00%
69	Dokter	1	5	6	0,01%
70	Bidan	0	39	39	0,09%
71	Perawat	4	19	23	0,04%
72	Apoteker	0	1	1	0,00%
73	Psikiater/Psikolog	0	0	0	0,00%
74	Penyiar Televisi	0	0	0	0,00%

75	Penyiar Radio	1	0	1	0,00%
76	Pelaut	14	0	14	0,03%
77	Peneliti	0	0	0	0,00%
78	Sopir	263	0	263	0,60%
79	Pialang	0	0	0	0,00%
80	Paranormal	2	0	2	0,00%
81	Pedagang	176	364	540	1,24%
82	Perangkat Desa	129	16	145	0,33%
83	Kepala Desa	15	1	16	0,03%
84	Biarawati	0	0	0	0,00%
85	Wiraswasta	3.672	1.407	5.079	11,65%
86	Lainnya	0	0	0	0,00%
	JUMLAH			43.593	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan Batangan sebagai berikut:

Tabel II.11

Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan Batangan

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	21.506	21.434	42.940	98,50%
2	Kristen	267	286	553	1,27%
3	Katolik	20	18	38	0,09%
4	Hindu	3	1	4	0,01%
5	Budha	1	1	2	0,005%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	33	24	57	0,13%
	JUMLAH			43.594	100%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan

Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Batangan didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan Batangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.12

Angka Kriminlitas di Kecamatan Batangan

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	na	na	na	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	na	na	na	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	na	na	na	2	3
4	Jumlah kasus penganiayaan	na	na	na	4	3
5	Jumlah kasus pencurian	na	na	na	17	15
6	Jumlah kasus penipuan	na	na	na	2	3
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	na	na	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	na	na	25	24

9	Jumlah penduduk	na	na	na	43.340	43.340
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	na	na	5,76	5,53

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak kriminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

2. Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling).

Terkait dengan ketersediaan Posko Keamanan Lingkungan (Poskamling) di Kecamatan Batangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.13
Data Poskamling di Kecamatan Batangan

No	Desa	Poskamling		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Tlogomojo	0	0	0
2.	Sukoagung	2	0	2
3.	Bulumulyo	20	10	30
4.	Tompomulyo	1	2	3
5.	Kuniran	1	3	4
6.	Gunungsari	7	0	7
7.	Kedalon	20	0	20
8.	Klayusiwalan	2	3	5
9.	Ngening	2	0	2
10.	Raci	3	2	5
11.	Krtitangwetan	0	0	0
12.	Bumimulyo	3	0	3
13.	Jembangan	6	0	6
14.	Lengkong	0	0	0
15.	Mangunlegi	4	3	7
16.	Batursari	10	4	14
17.	Gajahkumpul	5	3	8
18.	Pecangaan	3	4	7
	Jumlah	89	34	123

3. Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Terkait dengan keberadaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kecamatan Batangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.14

Data Anggota Linmas di Kecamatan Batangan

No	Desa	Linmas		
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1.	Tlogomojo	7	0	7
2.	Sukoagung	16	14	30
3.	Bulumulyo	22	4	26
4.	Tompomulyo	6	0	6
5.	Kuniran	25	6	31
6.	Gunungsari	12	0	12
7.	Kedalon	22	0	22
8.	Klayusiwalan	14	11	25
9.	Ngening	27	4	31
10.	Raci	20	2	22
11.	Ketitangwetan	21	0	21
12.	Bumimulyo	10	0	10
13.	Jembangan	12	0	12
14.	Lengkong	20	0	20
15.	Mangunlegi	18	12	30
16.	Batursari	15	15	30
17.	Gajahkumpul	20	2	22
18.	Pecangaan	15	0	15
	Jumlah	302	70	372

Evaluasi capaian kinerja pelayanan Kecamatan Batangan periode 2012-2017 sebagai berikut :

Tabel II.15
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATANGAN
KABUPATEN PATI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Kriminalitas		4		6,1	5,8	5,2	4,5	4	6,3	6,1	5,6	5,0	4,5	1,03	1,05	1,08	1,11	1,13
2	Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%		40		20	25	30	35	40	19	26	30	35	40	0,95	1,04	1	1	1
3	Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%		30		20	23	25	27	30	18	21	24	26	30	0,90	0,91	0,96	0,96	1
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berprestasi		15		13,5	13,7	14	14,5	15	12,4	13	13,5	14	14,6	0,91	0,94	0,96	0,96	0,97
5	Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1
6	Persentase usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten		4		4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5
7	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		35		29	31	32	34	35	26	27	28	30	33	0,89	0,87	0,93	0,88	0,94
8	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	mendukung penanggulangan kemiskinan.																		
9	Persentase usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten		4		1	1	2	3	4	0	0	1	2	3	0	0	0,5	0,66	0,75
10	Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan		2,8		2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	0,91	0,96	0,96	0,96	0,96
11	Persentase Realisasi Capaian RKPDes		60		48	50	52	57	60	45	47	50	55	57	0,93	0,94	0,96	0,96	0,95
12	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	87	88	90	94	95	0,87	0,88	0,90	0,94	0,95
13	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu		100		100	100	100	100	100	90	90	91	92	95	0,90	0,90	0,91	0,92	0,95
14	Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan		55		51	52	53	54	55	40	42	45	47	49	0,78	0,79	0,84	0,87	0,89
15	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib		65		45	50	55	60	65	39	41	47	51	56	0,86	0,82	0,85	0,85	0,86

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan Batangan sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada tahun 2013 s/d 2017 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Batangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.16.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BATANGAN
KABUPATEN PATI**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dml Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	126.472	163.510	154.468	199.206	193.425	158.000	161.083	151.444	173.409	190.806	99,84	98,52	98,04	99,88	99,65	37,32	99,19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	60.235	44.558	74.909	49.916	46.640	44.735	44.558	71.759	49.916	46.640	100	100	95,79	100	100	-10,53	99,16
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.600	6.600	8.400	13.750	13.750	6.600	6.600	8.400	13.750	13.750	100	100	100	100	100	71,50	100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	7.650	7.650	0	0	8.000	7.650	7.650	-	-	8.000	100	100	-	-	100	35,00	100

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.605	4.608	4.487	2.503	2.238	4.605	4.608	4.487	2.503	2.238	100	100	100	100	100	- 23,6 9	100
Program Penataan Administrasi Kependudukan	63.572	57.344	58.250	51.326	23.541	57.718	57.344	58.250	51.326	23.354	90,79	100	100	100	99,20	- 35,0 4	97,99
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	0	0	0	0	7.913					7.913					100	79,1 3	100
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	9.692	9.692	11.030	9.918	9.607	9.692	9.692	11.030	9.918	9.607	100	100	100	100	100	- 85,0 0	100
Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	5.119	-	-	-	-	5.119	-	-	-	-	100	51,1 9	100

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	-	-	-	-	2.035	-	-	-	-	2.035					100	20,35	100
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	10.616	12.000	15.298	3.160	1.270	10.616	12.000	15.298	3.160	1.270	100	100	100	100	100	-10,45	100
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.139	13.637	14.800	12.969	12.266	10.139	13.637	14.800	12.969	12.266	100	100	100	100	100	-6,71	100
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Publik (PATEN)	0	47.500	14.340	2.000	71.613	-	47.500	14.340	2.000	69.849	0	100	100	100	97,54	33,61	79,50
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	9.000	0	11.800	0	0	9.000	-	11.800	10.700	-	100	-	100	100	-	-18,00	100

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dlm Ribuan)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	23.000	23.000	9.518	0	-	23.000	23.000	9.518	-	-	100	100	100	-	184,00	100
JUMLAH	308.581	390.099	389.733	364.966	385.067	318.755	387.672	384.608	339.169	339.169	98,12	99,38	98,42	99,94	99,94	1,05	99,16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Batangan

Tantangan pengembangan pelayanan kecamatan Batangan merujuk pada tugas fungsi utama kecamatan yaitu koordinasi (i) penyelenggaraan pemerintahan, (ii) pelayanan publik, dan (iii) pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Batangan kurun 2012-2017, maka tantangan pengembangan ke arah lima tahun yang akan datang (2017-2022) sebagai berikut.

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.

Tantangan dalam memberikan rasa aman dalam hal ini menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui pengembangan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Keberadaan lembaga posko keamanan lingkungan (Poskamling) yang selama ini sudah ada memerlukan upaya untuk mengembalikan peran dan fungsinya untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Selain itu keberadaan tenaga perlindungan masyarakat (Linmas) dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan.

2. Koordinasi bidang fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan

Tantangan ke depan adalah implementasi teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan di era keterbukaan informasi, maka tantangan pengembangannya adalah bagaimana kecamatan menguatkan fasilitasi dan koordinasi lintas pelaku untuk menyediakan data sektoral kewilayahan yang akurat dan terbaru.

Peluang pengembangan ke depan perlu diprioritaskan optimalisasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat. Oleh karena itu tantangan sekaligus peluang pengembangannya adalah peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur kecamatan.

3. Pelayanan Publik

Tantangan pembangunan nasional dalam RPJMN dimana seluruh daerah di Indonesia diprogramkan bergerak ke arah Smart City memberi tantangan khusus bagi kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart kecamatan (Kecamatan cerdas). Fokus pengembangan pelayanan

kurun lima tahun ke depan adalah menuju kecamatan berstandar ISO untuk pelayanan publik.

4. Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan

Tantangan dari RPJMN 2014-2019 adalah bagaimana menguatkan partisipasi masyarakat menuju tata kelola pemerintahan yang demokratis dan menguatkan kemandirian wilayah. Tantangan pengembangan layanan kecamatan kurun 2017-2022 lebih memerlukan fokus pengembangan dalam hal isu:

- a. Partisipasi masyarakat untuk menjaga pengendalian kualitas dan kuantitas sumber lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga dan kegiatan usaha.
- b. Partisipasi masyarakat untuk memenuhi rasio kebutuhan sarana sanitasi lingkungan untuk mengurangi resiko dampak kesehatan dikarenakan lingkungan pemukiman yang tidak sehat.